

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alting, Husen., *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSind, 2010.
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, hal. 85.
- Deden Fathurrohman dan Wawan Sobri, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm.185 – 186
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 831
- G. Kertasapoetra, et.al, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- I.C. van der Vlies, 2005, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, alih bahasa Linus Doludjawa*, Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, hal. 280.
- Jim Ife, *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hal. 45
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2005. "Data Primer, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Secara Dan Pengamatan Secara Mendalam Kepada Para Informannya." 1.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2006. *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, hal. 23.

Samuel P Huntington and Joan M Nelson, *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, 1976, hlm. 4.

Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora, Cetakan. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 6 – 8.

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 1999

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 188.

Jurnal:

Hidayati, Siti., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)”, *Bina Mulia Hukum*. Vol. 3, No. 2, Maret 2019.

Imanullah, M. A., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Prosiding UMY Grace*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Irawan, Fuad Bayu. 2014. “Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 26–35.

Jati, Rahendro., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1, No. 3, 2012.

Mariana, D., “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Riskiyono, Joko., “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Aspirasi*. Vol. 6, No. 2, 2015.

Syamsudin. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen RPJM Desa Berdasarkan Wilayah Dusun di Desa Kertosono Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. *Jurnal Enersia Publika*, 6(2),n169-178.

Sahidin. 2015. "Metode Penelitian Bab III." *Biomass Chem Eng* 49(23–6):40–68.

Internet:

Andika, Pundarika Vidya. (2022). "Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik". Retrieved from: iap2.or.id: <https://iap2.or.id/mengenal-arnsteins-ladder-dalam-menata-partisipasi-publik/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2023 Pukul 14.21 WIB

BPHN. (2015). Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Retrieved from bphn.go.id: https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hk_m_adat.pdf, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 10.08 WIB

DPR RI. (2020). Badan Legislasi. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

DPR RI. (2020). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-051940-9169.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 10.08 WIB

DPR RI. (2020). Tugas Wewenang. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

Gultom, Pardomuan. (2021). Jalan Panjang RUU MHA Memperoleh Pengakuan. Retrieved from analisadaily.com: <https://analisadaily.com/e-paper/2021-04-30/files/assets/basic-html/index.html#12>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

Komnas HAM RI. (2020). Menyoal RUU Masyarakat Hukum Adat. Retrieved from komnasham.go.id: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/30/1460/menyoal-ruu-masyarakat-hukum-adat.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 11.13 WIB

RMOL. (2023). Profil DPR RI. Retrieved from dpr.go.id:
<https://rmol.id/dpr/page/profil.php>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023
Pukul 01.05 WIB